



PERCEPATAN PENANGANAN KEMISKINAN

Perlu Komitmen dan Kerja Sama Lintas Sektor

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus melakukan sejumlah upaya untuk mendukung percepatan penanganan kemiskinan di DIY. Adapun program kegiatan mendukung penanggulangan kemiskinan tersebut ada 4 klaster. Meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan akses terhadap sumber daya manusia.

Tentunya beberapa hal di atas akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada komitmen bersama dan kerja sama lintas sektor.

"Kami berharap bisa percepatan pelaksanaan APBD di DIY, begitu pula dengan kabupaten/kota. Oleh karena itu bagi OPD yang telah memiliki gambaran mana tugas tidak mendesak atau harus menunggu pekerjaan lain itu bisa dikedepankan di triwulan awal. Dengan demikian akan muncul peredaran uang lebih

banyak di DIY sehingga akan mengurangi angka kemiskinan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Jumat (10/2).

Baskara Aji mengatakan, apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di masyarakat tinggi, diharapkan bisa mendorong upaya percepatan penanganan kemiskinan. Sehingga yang pada awalnya masuk kategori miskin bisa menjadi tidak miskin. Walaupun dalam realitanya untuk mewujudkan

kan hal itu tetap membutuhkan proses dan komitmen bersama.

"Apabila OPD memiliki kontrak fisik, kontrak besar baik untuk pembangunan gedung, jalan, jembatan dan lainnya, mohon bisa diatur bahkan kalau perlu di addendum kontraknya agar pencairannya bisa perbulan. Karena dengan begitu bukan hanya daya serapnya yang kita kejar akan tetapi supaya pemborong bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ekonomi di DIY," terangnya.

Kabid Perencanaan Bappeda DIY Danang Setiadi MT menambahkan, percepatan penanganan kemiskinan di DIY perlu daya dukung dari semua OPD dan stakeholder terkait. Nantinya akan ada dua model program pemberdayaan yang akan dilakukan Pemda DIY yaitu

pemberdayaan penyandang miskin ekstrem berupa bantuan sosial. Juga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan harapan untuk meningkatkan pengeluaran, program peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tidak hanya itu Pemda DIY pada tahun 2023 juga telah menargetkan angka kemiskinan di DIY pada angka 10,66 persen dari angka sebelumnya yang mencapai 11,49 persen.

"Mulai tahun 2022 kemarin diupayakan dari angka 11,49 persen tersebut bisa turun menjadi 10,66 persen di tahun 2023. Tentu untuk mewujudkan hal itu perlu dukungan kita semua baik di Pemda DIY maupun di Kabupaten/Kota," ujarnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005